



KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019

**Kedeputian Pengembangan Regional
Kementerian PPN/Bappenas**

**Disampaikan dalam Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) TA 2019
Jakarta, 10 Desember 2018**



1

Sasaran Makro Pembangunan Nasional

2

Pokok-Pokok RKP 2019

3

Aspek Kewilayahan

4

Pendanaan Pembangunan

5

Pemetaan Dukungan DAK dalam Pencapaian Prioritas Nasional RKP 2019

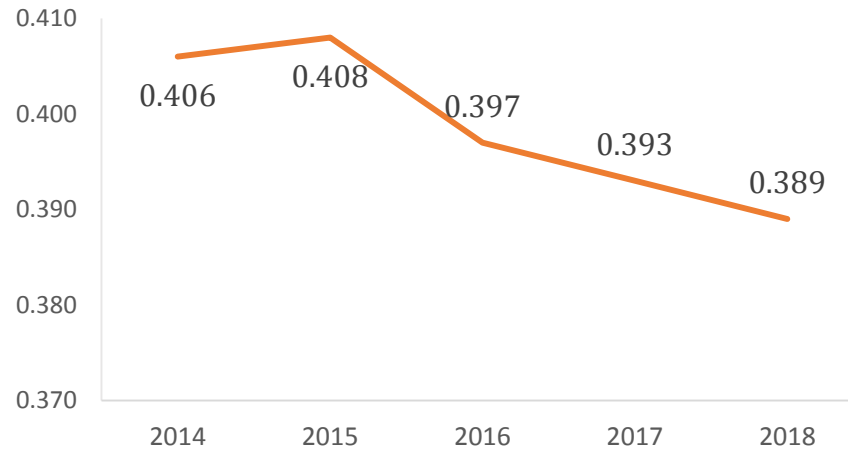
1

Sasaran Makro Pembangunan Nasional

Pencapaian Sasaran Makro Pembangunan

**ANGKA
KETIMPANGAN**
turun menjadi
0,389

dan semakin membaik



Keterangan: Susenas, Maret 2014 – Maret 2018



INDEKS PEMBANGUNAN

MANUSIA

naik menjadi

70,81

68,90
(2014)



70,81
(2017)

Sumber: BPS, April 2018



**TINGKAT
PENGANGGURAN**
turun menjadi
5,13%

5,70%
(Februari 2014)



5,13%
(Februari 2018)

Sumber: Sakernas, Februari 2018

Tingkat kemiskinan turun menjadi **9,82%** dan jumlah penduduk miskin berkurang menjadi **25,95 juta jiwa**



Persentase penduduk miskin
berkurang (persen)

11,25
2014 (Mar)



9,82
2018 (Mar)

Jumlah penduduk miskin berkurang
(juta jiwa)

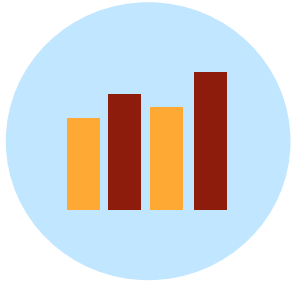
28,28
2014 (Mar)



25,95
2018 (Mar)

Sumber: Susenas, Maret 2018

Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2019



Pertumbuhan Ekonomi
5,3%



Tingkat Pengangguran Terbuka
4,8–5,2%



Tingkat Kemiskinan
8,5–9,5%



Rasio Gini
0,380–0,390



Indeks Pembangunan Manusia
71,98

2

Pokok-Pokok RKP 2019



**Menajamkan
Prioritas Nasional**



**Memastikan
Pelaksanaan
Program**

**Menajamkan
Integrasi
Sumber Pendanaan**

Belanja K/L, Belanja Non K/L,
Belanja Transfer ke Daerah, PHLN,
BUMN, PINA dan Swasta

**Tahun 2019 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019
RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan)
untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN**

Tema RKP

“Pemerataan
Pembangunan
untuk
Pertumbuhan
Berkualitas”



1

Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar



2

Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman



3

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya



4

Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air



5

Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

PP 1

Percepatan Pengurangan Kemiskinan



Peningkatan indeks kondisionalitas PKH bagi 10 Juta KPM

Perluasan Bantuan Pangan Non Tunai bagi 15,6 juta KPM di seluruh Kabupaten/Kota



Penyaluran subsidi energi tepat sasaran bagi penduduk miskin dan rentan



Pemberian bantuan pendidikan bagi 20,1 juta anak usia sekolah

Perluasan bantuan iuran kesehatan bagi 107,2 juta jiwa



Pelepasan Tanah Obyek Reforma Agraria sebesar 57323 ha dan pengelolaan hutan kemasyarakatan seluas 300 ribu ha



PP 2

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Peningkatan imunisasi dasar serta penyaluran alat dan obat kontrasepsi



Penurunan stunting melalui pemberian ASI eksklusif dan pemberian tablet tambah darah (TTD) selama masa kehamilan

Perluasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) terpadu



PP 4

Peningkatan Akses Perumahan dan Permukiman Layak



Peningkatan kualitas hunian dan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi rumah tangga



Pemantauan kualitas udara ambien dan pengelolaan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)

PP 3

Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas



Peningkatan pendidik yang berkualitas melalui sertifikasi guru

Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan di daerah 3T melalui penyediaan fasilitas dasar dan akreditasi lembaga pendidikan



Pelayanan berbasis inklusi sosial melalui penyediaan literasi khusus dan penyuluhan

PP 5

Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar

Perluasan verifikasi validasi data serta layanan terpadu bagi penduduk miskin dan rentan



Percepatan kepemilikan dan sinkronisasi dokumen kependudukan (akta kelahiran, NIK)

Penerapan dan penataan kelembagaan SPM di daerah





PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

- PKH menyalurkan bantuan non tunai bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan anak balita, usia sekolah, ibu hamil, penyandang disabilitas dan lanjut usia
- Peningkatan indeks bantuan 2x lipat untuk mengembalikan nilai bantuan dari 9% (saat ini) menjadi 16% dari total pengeluaran (seperti saat diluncurkan)



BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)

- BPNT ditujukan untuk pengurangan beban pengeluaran pangan, perbaikan nutrisi, dan mendorong inklusi keuangan bagi 15,6 juta KPM
- BPNT dilaksanakan bertahap ke seluruh Kabupaten/Kota sejalan dengan kesiapan jaringan agen, perbankan, kesiapan sinyal, dan dukungan Pemda



KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)

- Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda untuk menjamin keberlanjutan pendidikan anak
- Tahun 2019 pemberian bantuan pendidikan diberikan bagi 20,1 juta anak usia sekolah, naik dari sebelumnya sebesar 19,7 juta jiwa pada tahun 2018



KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)

- Penerima Bantuan Iuran JKN-KIS ditingkatkan hingga 107,2 juta jiwa (40 persen penduduk berpendapatan terendah)
- Kemensos menuntaskan verifikasi dan validasi data 107,2 juta jiwa pada akhir tahun 2018

DANA DESA



- 1 Peningkatan Produktivitas Perekonomian Desa
- 2 Mengatasi Kemiskinan dan Stunting melalui peningkatan pendapatan
- 3 Mengurangi ketimpangan pembangunan desa-kota

Arah Kebijakan Pemanfaatan Dana Desa:

- Perbaiki pelayanan dasar (air bersih, sanitasi, listrik desa)
- Peningkatan ekonomi produktif
- Peningkatan kapasitas dan tata kelola aparat desa & kecamatan

TUJUAN PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM)



- 1 Meningkatkan layanan dan pendampingan usaha untuk percepatan perkembangan usaha bagi keluarga rentan
- 2 Mengakselerasi nasabah saat ini untuk naik kelas, serta mendorong inklusi keuangan dan terlibat dalam bisnis digital
- 3 Mendorong pengurangan ketimpangan

Arah Kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah dalam PNM:

- Meningkatkan jumlah nasabah PNM Mekaar (ibu-ibu dari keluarga rentan dari 3,2 juta menjadi 5,7 juta)
- Meningkatkan jumlah plafon PNM Mekaar bagi ibu-ibu dari keluarga rentan
- Akselerasi nasabah saat ini naik kelas yang semula 5 tahun menjadi 3 tahun



Meningkatkan konektivitas dan teknologi informasi dan komunikasi

1. Mengembangkan pelabuhan dan angkutan tol laut
2. Membangun dan mengembangkan transportasi multimoda dan perkotaan
3. Membangun dan mengembangkan bandara pada jalur utama transportasi
4. Meningkatkan dan menyediakan fasilitas keselamatan transportasi
5. Menyediakan dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi



Mempercepat Pembangunan Papua dan Papua Barat

1. Meningkatkan akses pelayanan dasar pendidikan berbasis digital, kesehatan jarak jauh, dan pelayanan publik
2. Membangun konektivitas, telekomunikasi dan informatika yang dapat menghubungkan provinsi, kab/kota, distrik dan kampung
3. Menurunkan kemahalan harga
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
5. Mengembangkan keterkaitan hulu hilir komoditas unggulan



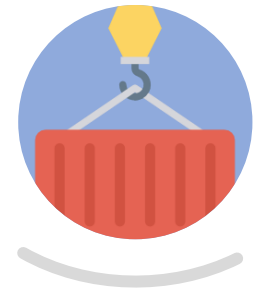
Mempercepat Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa

1. Mempercepat pemenuhan pelayanan dasar
2. Mengembangkan perekonomian kawasan & meningkatkan pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau terluar, dan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi



Menanggulangi Dampak Bencana

1. Meningkatkan kapasitas, kesiapsiagaan dan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana; mitigasi bencana
2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana
3. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan Daerah



Meningkatkan Sistem Logistik

1. Membangun infrastruktur dan sarana transportasi dan distribusi yang handal, efisien dan efektif
2. Mewujudkan Sistem Logistik Perikanan dan Pertanian yang terintegrasi dengan sistem logistik nasional

PP 1 Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian



Peningkatan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan

Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan



Peningkatan mutu, sertifikasi, dan standarisasi hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan

Perkuat kelembagaan dan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan



Peningkatan sarana dan prasarana pendukung nilai tambah pertanian, perikanan dan kehutanan

PP 2 Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan

Perbaiki iklim usaha dan peningkatan investasi



Pengembangan dan peningkatan investasi industri hulu non-agro dan pendukung

Peningkatan daya saing industri andalan non-pangan



Pengembangan 7 KI dan 6 KEK industri/logistik

PP 4 Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja



Peningkatan kerja sama dengan dunia usaha

Penguatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi



Pemantapan sistem sertifikasi kompetensi



Peningkatan keterampilan wirausaha

PP 3 Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya



Percepatan pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas termasuk 4 KEK pariwisata, dan penguatan pemasaran pariwisata prioritas

Perkuat struktur ekonomi kreatif



Peningkatan perdagangan dalam dan luar negeri



Perluasan akses keuangan/ Pembiayaan

PP 5 Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas

Penelitian dan pengembangan bidang keilmuan strategis penunjang produktivitas



Pengembangan dan pemanfaatan teknologi pengungkit produktivitas

Penyiapan SDM IPTEK (peneliti dan perekayasa)



Perkuat inovasi dan penguasaan teknologi *frontier*

Garis Besar Kebijakan Prioritas Nasional 4



Meningkatkan produksi energi primer



Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi



Meningkatkan aksesibilitas energi



Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik



Mempertahankan dan memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri



Meningkatkan layanan pertanian dan perikanan melalui penyediaan sarana prasarana, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan, pemanfaatan inovasi teknologi, serta perkarantina (2 KP)



Memperkuat distribusi dan stabilisasi harga pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat



Mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan dengan penyediaan pangan yang beragam dan bergizi dengan sumber daya lokal



Memantapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air



Memberi perlindungan pada sumber air dan ekosistemnya



Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air yang adil dan merata



Mempercepat regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS



Meningkatkan kesadaran terkait sumber daya air



Meningkatnya daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan

PP 1

Kamtibmas dan Keamanan Siber



Pemenuhan Alamsus Polri

Pembangunan *Command Center*



Operasi intelijen siber

Pembangunan sistem interdiksi terpadu



Penyusunan dan pelaksanaan Renaksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Pelaksanaan deradikalisasi dalam dan luar lapas



PP 2

Kesuksesan Pemilihan Umum



Peningkatan kualitas tahapan Pemilu 2019

Pendidikan pemilih



Pengawasan netralitas ASN dalam Pileg dan Pilpres 2019

PP 4

Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi



Optimalisasi penerapan kebijakan Keadilan Restoratif dalam penanganan perkara pidana

Penerapan kebijakan Kepemilikan Manfaat (BO)



Percepatan implementasi E-Gov yang terintegrasi

Penyusunan rancangan sistem kelembagaan manajemen talenta



PP 3

Pertahanan Wilayah Nasional



Operasi keamanan laut

Pembangunan JIPP, Pos Pamantas, Posal



Modernisasi Alutsista

PP 5

Efektivitas Diplomasi



- Peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri



- Penguatan kerja sama pembangunan internasional untuk mendukung peningkatan perdagangan dan investasi (KSST, *reverse linkage*, kerja sama global, dan lain-lain di Asia Pasifik dan Afrika)



- Perluasan pasar non-tradisional di kawasan Afrika

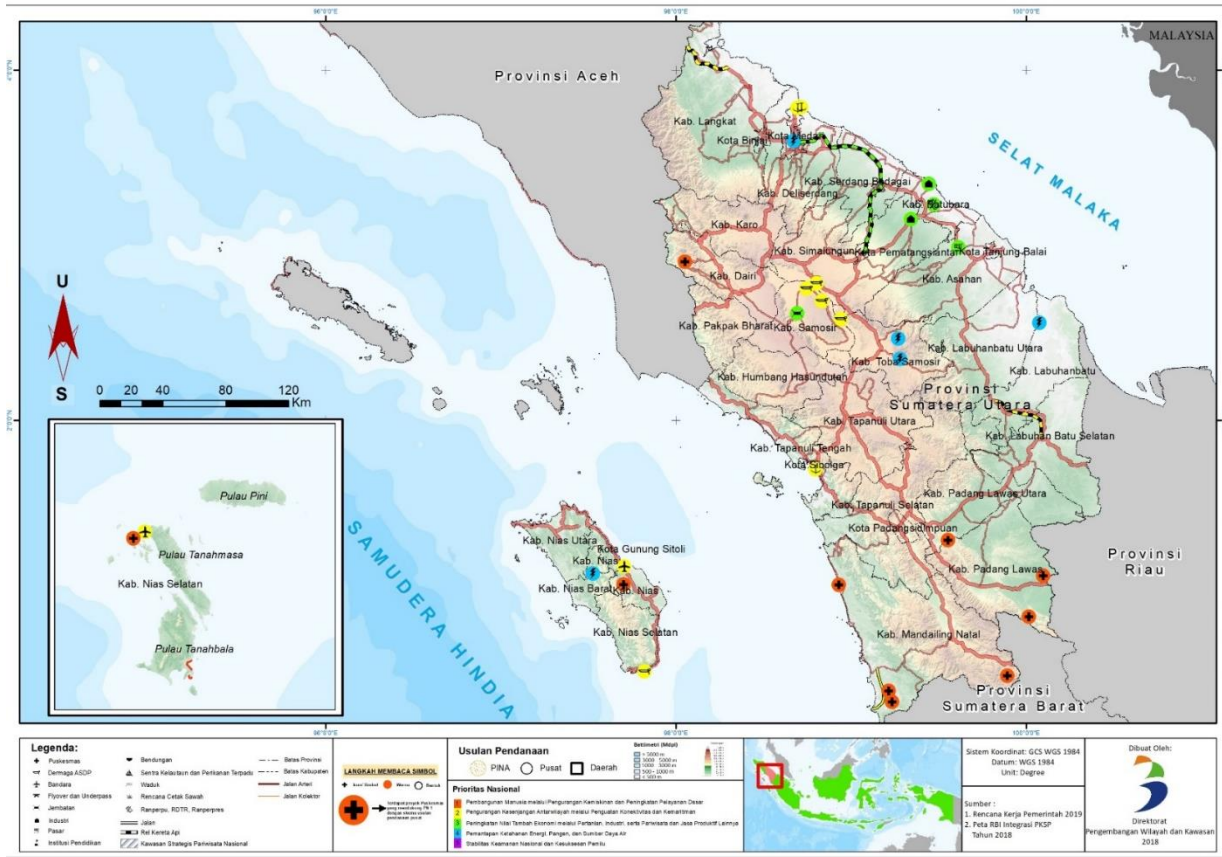
3

Aspek Kewilayahan

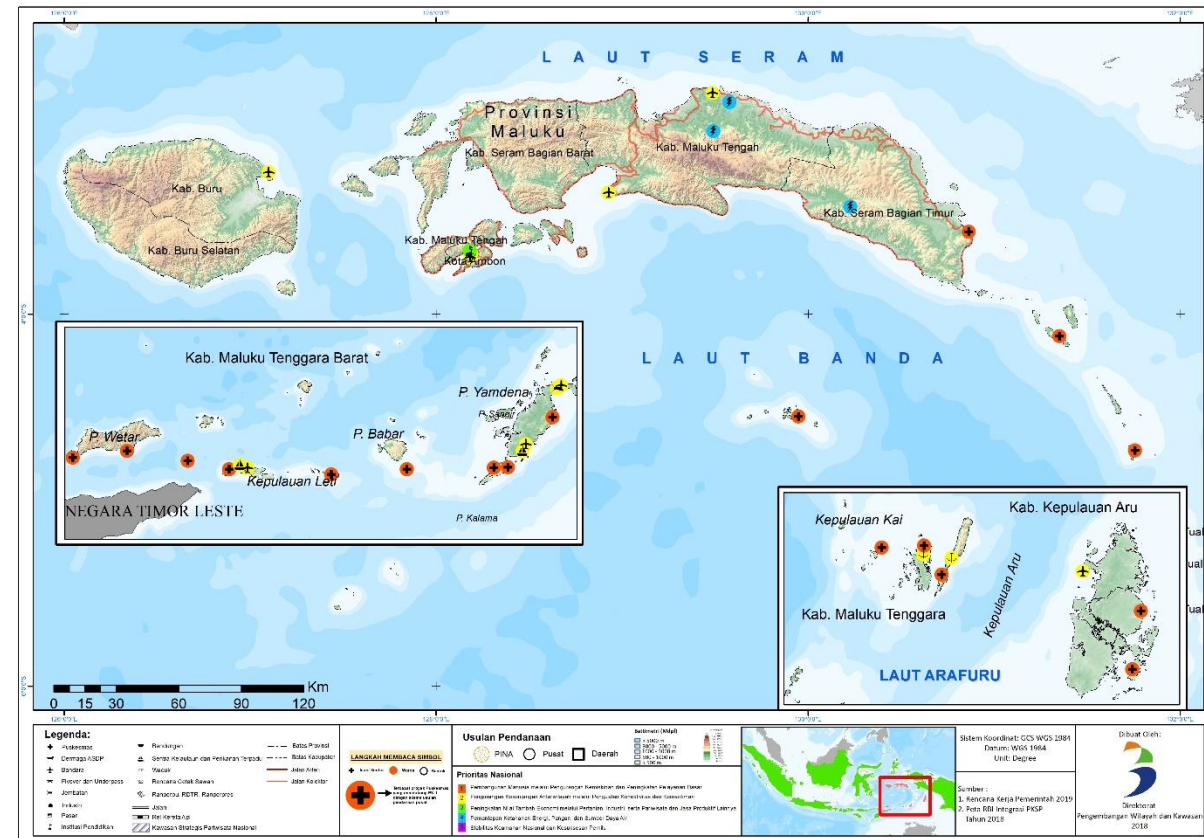


Contoh Pembangunan Kewilayahan dalam RKP

Provinsi Sumatera Utara








Provinsi Maluku



4

Pendanaan Pembangunan

PN	Prioritas Nasional	Alokasi Prioritas Nasional (Rp. Triliun)		
		Belanja K/L	KPBU- AP*)	Jumlah
01 	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	205,1	0,0	205,1
02 	Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	45,6	8,5	54,1
03 	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	21,0	0,0	21,0
04 	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	43,9	0,0	43,9
05 	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	64,5	0,0	64,5
	Jumlah	380,1	8,5	388,6

Belanja K/L di APBN 2019 sebesar Rp855,4 T, di mana Rp380,1 T (44%) dirinci ke proyek masing – masing K/L untuk mendukung capaian Prioritas Nasional.

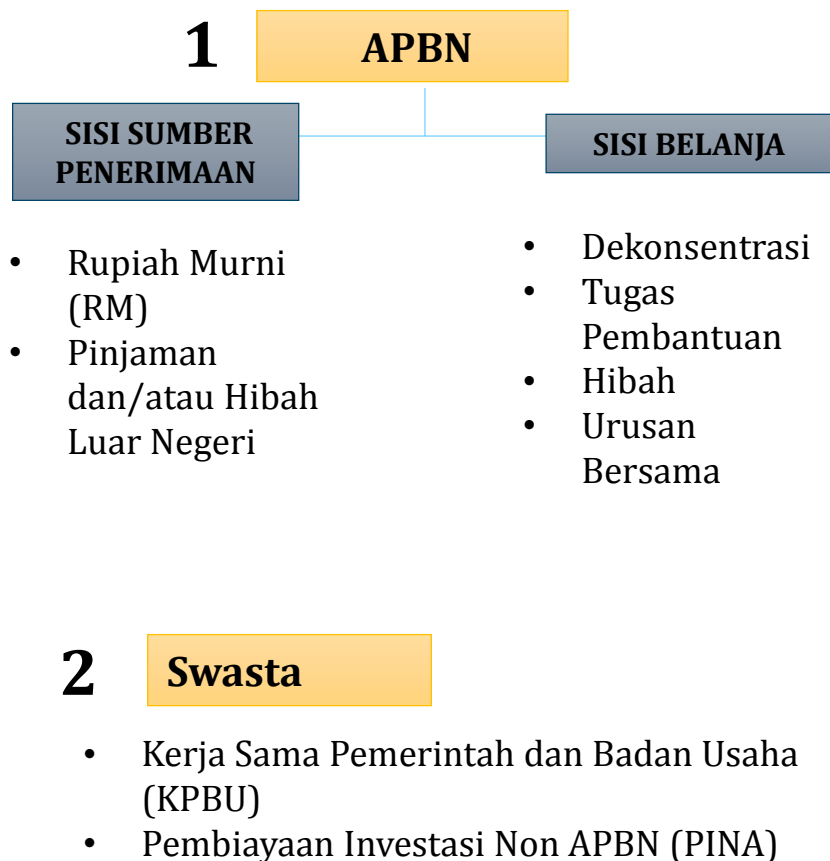
*) Terdapat potensi KPBU lainnya diluar KPBU – AP

Sumber:

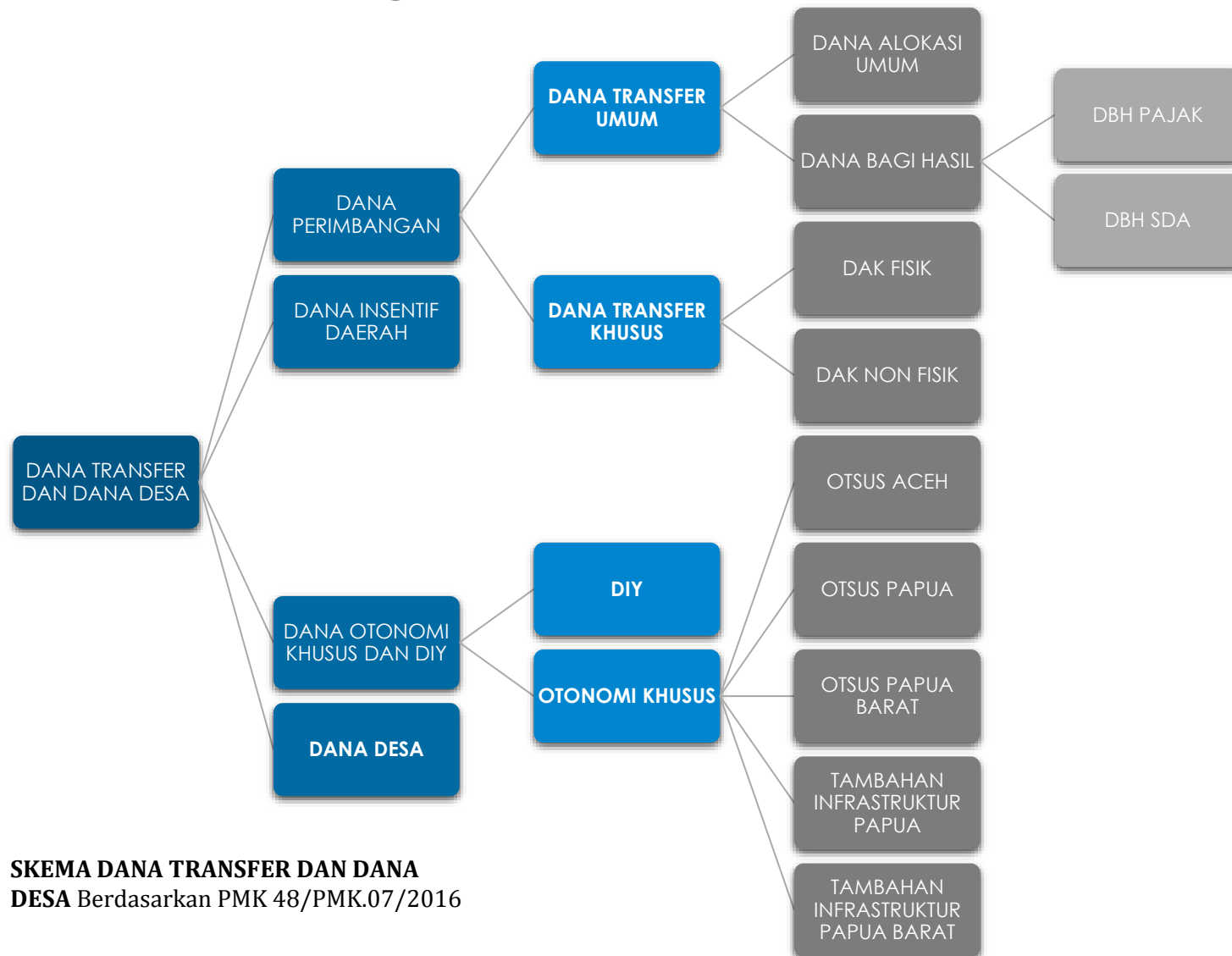
- a) Belanja K/L: KRISNA TA 2019 per 28 Nopember 2018 (diolah), 2018
- b) KPBU-AP : Public Private Partnership (PPP) *Project Pipeline* (diolah), 2018

Sumber-Sumber Pembiayaan

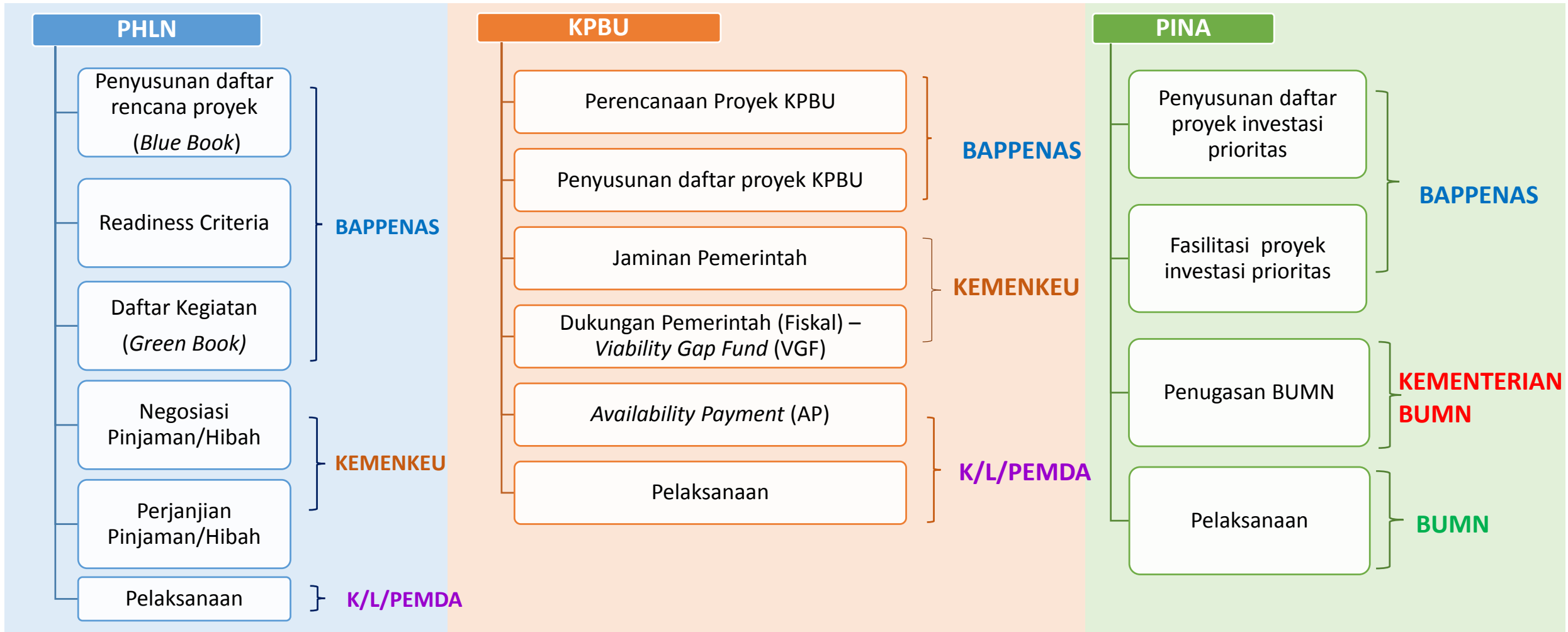
Lingkup Pemerintah Pusat



Lingkup Pemerintah Daerah



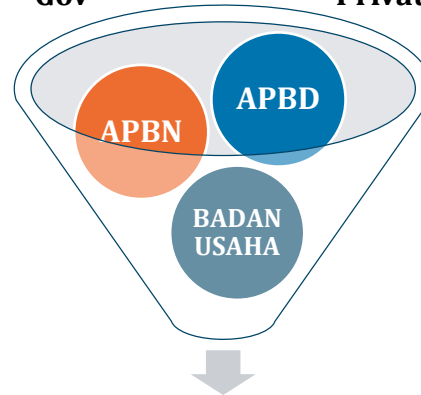
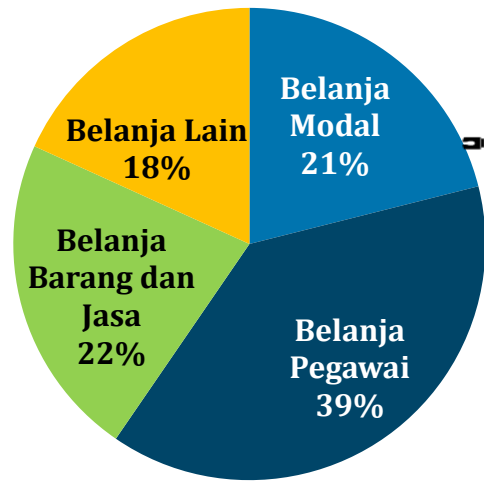
ALTERNATIF SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN : PHLN, KPBU dan PINA



☐ Menteri PPN/Kepala Bappenas berperan sebagai Koordinator PINA

Optimalisasi Kapasitas Pembiayaan Daerah dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Melalui KPBU

Komposisi belanja Daerah dalam APBD* secara nasional terdiri dari:



Infrastruktur



MANFAAT

KPBU



Mempercepat
penyediaan



Meningkatkan
kualitas layanan



Meningkatkan
governance

Dengan APBD sebesar Rp 250 M bisa mendapatkan infrastruktur senilai Rp 1,9 Triliun



Total investasi Rp 1,9 T

Badan Usaha Capex

APBN

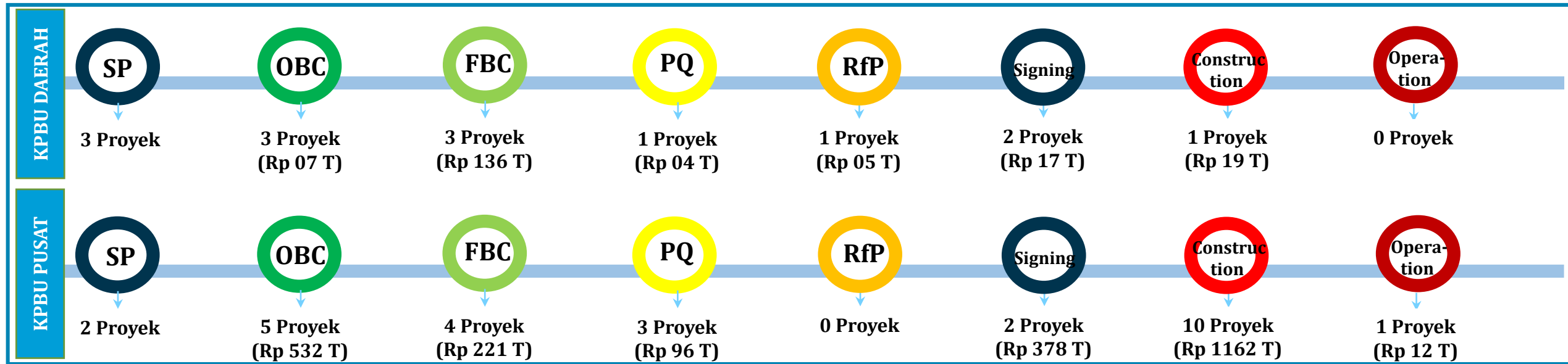
APBD

CK PUPR:
Dukungan
sebagian
konstruksi

VGf
Kemenkeu
Rp 818 M

DAK

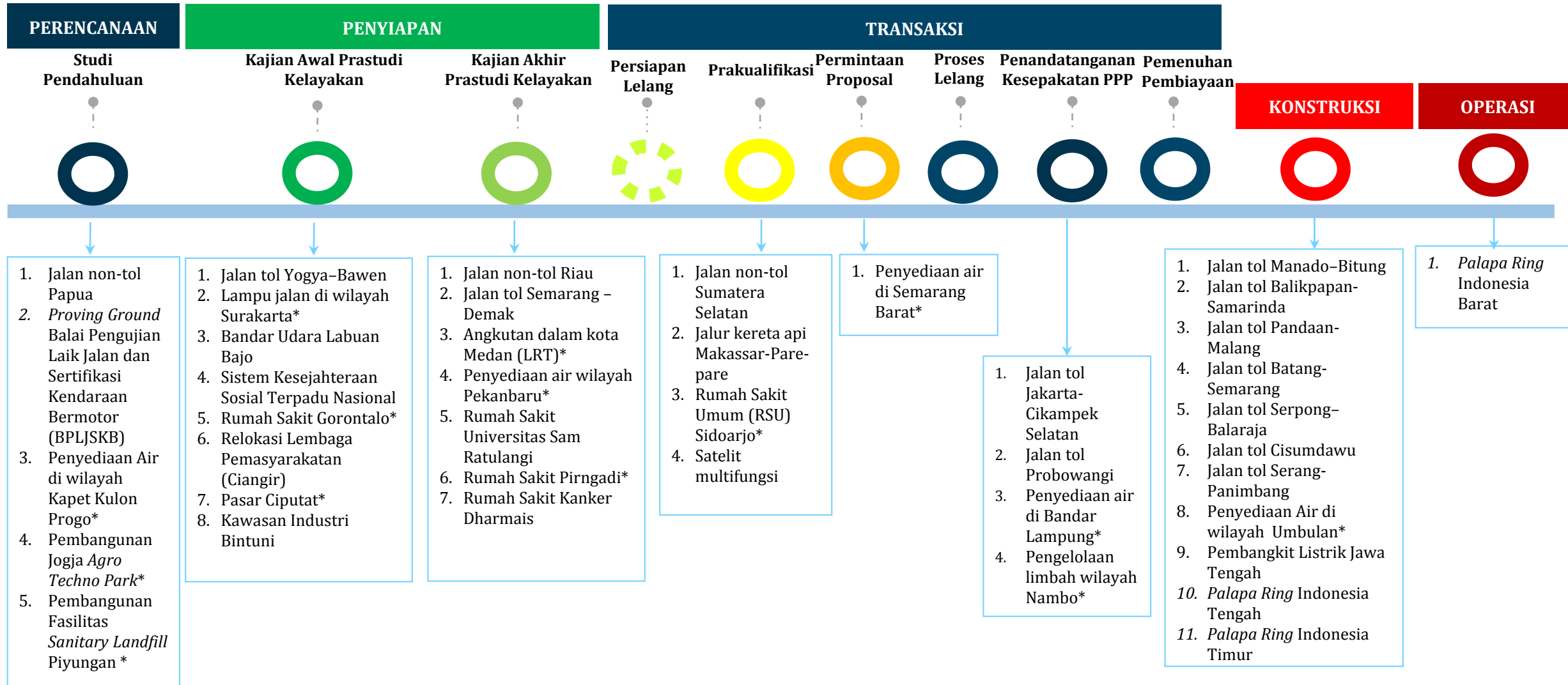
*J) Tahun 2017, sumber: <http://www.djpkemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-gambaran-umum-belanja-daerah-dalam-apbd-2017>



Keterangan:

- OBC : *Outline Business Case/Kajian Awal Prastudi Kelayakan*
- FBC : *Full Business Case/Kajian Akhir Prastudi Kelayakan*
- PQ : *Pre Qualification/Prakualifikasi*
- SP : *Studi Pendahuluan*
- RfP : *Request for Proposal*

Solicited PPP Project Pipeline



Keterangan:

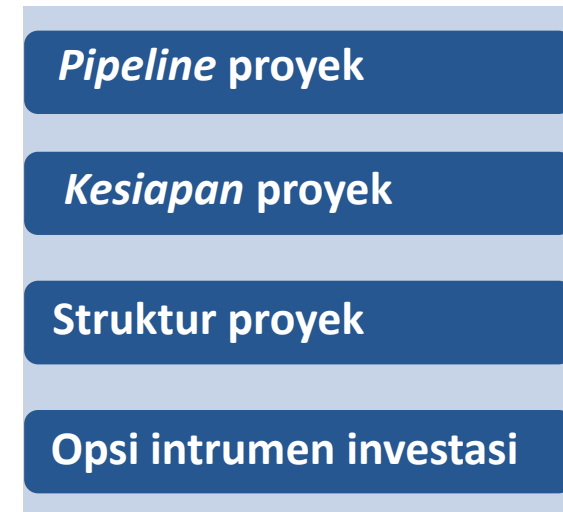
* Proyek daerah yang menggunakan KPBU

Skema Kerjasama dan Fungsi PINA

Peran signifikan PINA dalam pembiayaan proyek infrastruktur

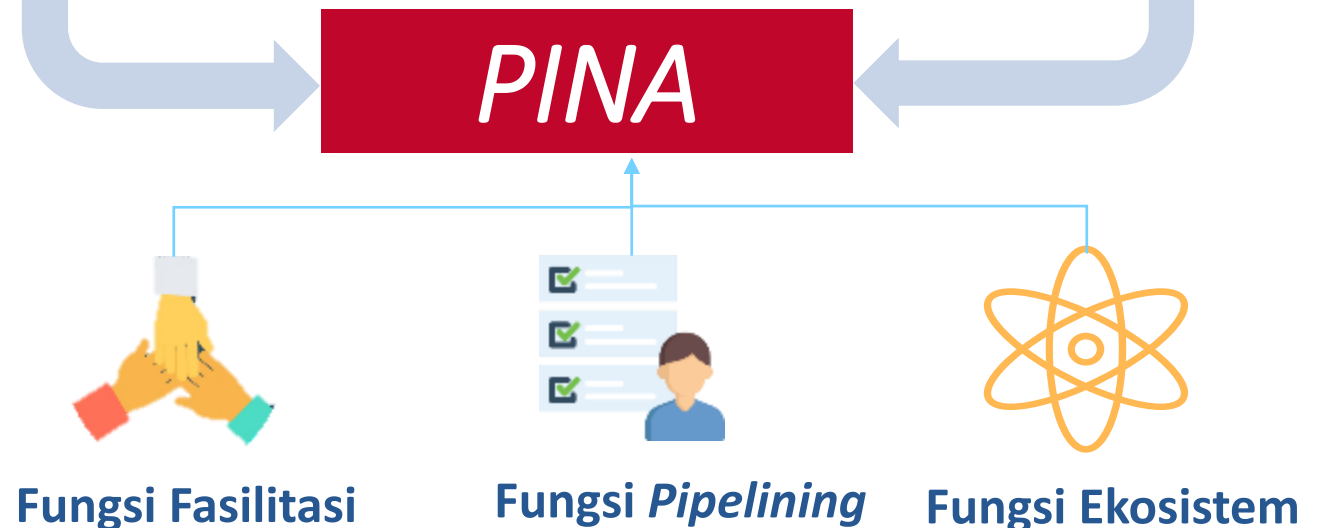
PINA adalah

mekanisme pembiayaan proyek investasi prioritas yang dananya bersumber selain dari Anggaran Pemerintah yang didorong dan difasilitasi oleh Kementerian PPN/Bappenas



TUJUAN PINA

- mendukung pencapaian target pembangunan nasional;
- memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi dalam negeri;
- melakukan konsolidasi dana jangka panjang;
- meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional;
- menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik;
- mengoptimalkan kontribusi Penerima Modal dan Penanam Modal terhadap proyek-proyek pembangunan Indonesia; dan
- meningkatkan kapasitas pembiayaan investasi melalui optimalisasi aset untuk mencapai tujuan



Potensi Proyek dalam Skema PINA

Terdapat potensi *recycle* investasi di setiap tahapan

KONDISI
PROYEK



GREENFIELD

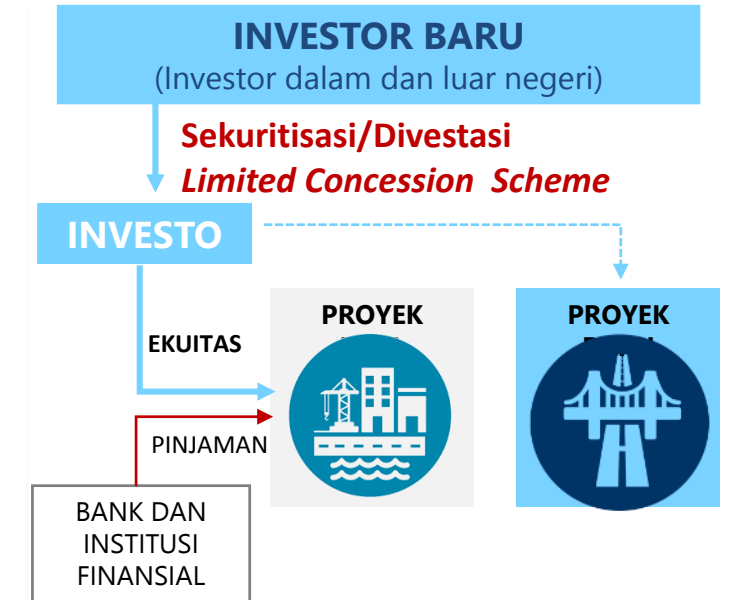
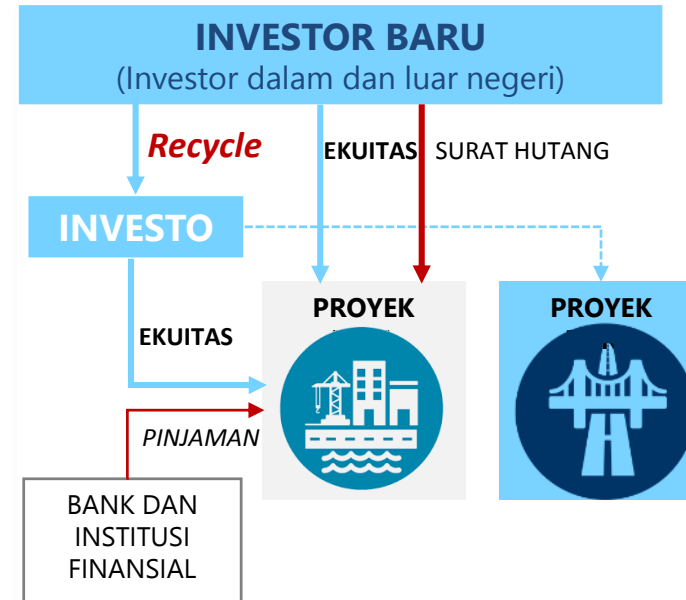
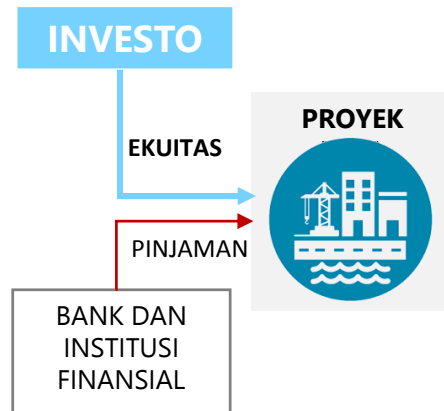


BROWNFIELD



OPERATIONAL

SKEMA
PEMBIAYAAN
INVESTASI





PT Nusanara Infrastruktur Tbk
Kerjasama investasi dengan partner
internasional strategis
IDR **1,81** triliun (USD 134 juta)
(partisipasi ekuitas)



**PT Bandara Internasional Jawa Barat
(BIJB)**
Kertajati Internasional Airport
(RDPT Ekuitas)
IDR **232,9** miliar (USD 69,7 juta)

● *Financially closed*

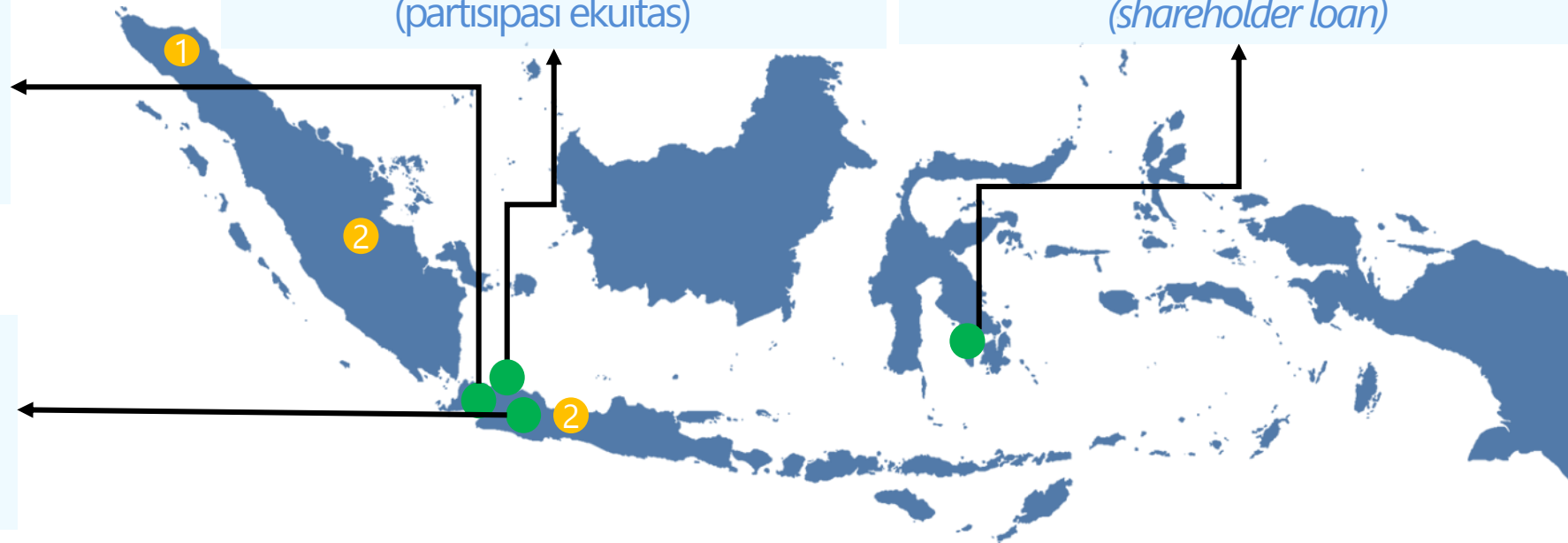
● Target *financial close* di akhir 2017



Waskita Toll Road - 15 Ruas Tol
IDR **3,5** triliun (USD 265,0 juta)
(partisipasi ekuitas)



PALAPA Ring Jaringan Serat Optik – Paket
IDR **174** miliar (USD 13,0 juta)
(shareholder loan)



1 PT PP Energi
Pengembangan PLTU Barubara
di Meulaboh, Aceh
Nilai Proyek: IDR 7,5 triliun
Target dana yang dikumpulkan:
IDR 1 triliun (ekuitas tahap awal)

2 PT Waskita Toll Road (phase 2)
Pengembangan Jalan Tol Trans-
Jawa dan Non Trans Jawa
Nilai Proyek: IDR 135 triliun
Target dana yang dikumpulkan:
Partisipasi ekuitas sampai 20 % di
WTR berdasarkan nilai valuasi
yang disetujui



1



Waskita Toll Road – Jalan tol Trans Jawa dan Non-Trans Jawa (18 Proyek)
(IDR 135 triliun / USD 10.000 juta)

2



PT PJB - Pembangkit Listrik (2 Proyek)
(IDR 14,5 triliun / USD 1.071 juta)

3



PT Indonesia Power - Pembangkit Listrik (6 Proyek)
(IDR 78,3 triliun / USD 5.798 juta)

4



PT PLN - Transmisi Listrik
(IDR 27,5 triliun / USD 2.040 juta)

5



BIJB (Pengembangan Fase 2 & Aerocity – 2 Proyek)
(IDR 30 triliun / USD 2.237 juta)

6



Bandara Kulon Progo DIY – PT Angkasa Pura 1 & PT PP
(IDR 6,7 triliun / USD 495 juta)

7



Pesawat R-80 – PT RAI
(IDR 21,6 triliun / USD 1.600 juta)

8



Pengembangan Area Terintegrasi Pulau Flores –
Flores Prosperindo, Ltd.
(IDR 13,5 triliun / USD 1.000 juta)

5

**Pemetaan Dukungan DAK dalam
Pencapaian Prioritas Nasional RKP
2019**

2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

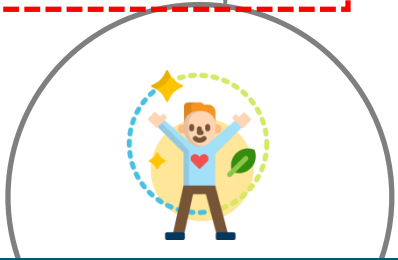
DAK KESEHATAN (AFIRMASI, PENUGASAN, REGULER) → Mendukung 5 KP

4 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak

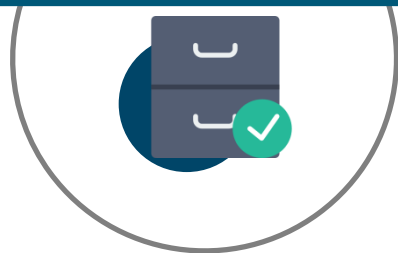
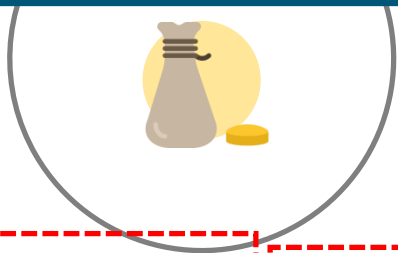
Penyediaan Akses Infrastruktur Dasar Air Minum, dan Sanitasi Layak

DAK PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN, AIR MINUM, DAN SANITASI

PRIORITAS NASIONAL 1



PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR



1 Percepatan Pengurangan Kemiskinan

Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial

DAK PENUGASAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

3 Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

Penyediaan Afirmasi Pendidikan

DAK PENDIDIKAN (AFIRMASI, PENUGASAN, REGULER)

5 Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar

Penguatan Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

2 Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat

- Penyelesaian Ruas Jalan Trans Papua dan Papua Barat, dan Konektivitas Antar Kabupaten/ Kota dan Kampung
- **DAK JALAN (REGULER DAN PENUGASAN) DAN TRANSPORTASI (AFIRMASI)**

4 Penanggulangan Bencana

- Penanganan Darurat dan Pemulihan Pascabencana

PRIORITAS NASIONAL 2

PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH MELALUI PENGUATAN KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN

1 Peningkatan Konektivitas dan TIK

- Pengembangan Pelabuhan *Hub* dan *Feeder* Jalur Utama dan Subsidi Tol Laut
- **DAK KELAUTAN DAN PERIKANAN (REGULER) DAN TRANSPORTASI (AFIRMASI)**

3 Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa

- Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan
- **DAK JENIS AFIRMASI**

5 Peningkatan Sistem Logistik

- Pengembangan Sistem Logistik dan Jaringan Pasar Komoditas Perikanan dan Pertanian
- **DAK KELAUTAN DAN PERIKANAN (REGULER), PASAR (PENUGASAN), DAN PERTANIAN (REGULER)**



PN



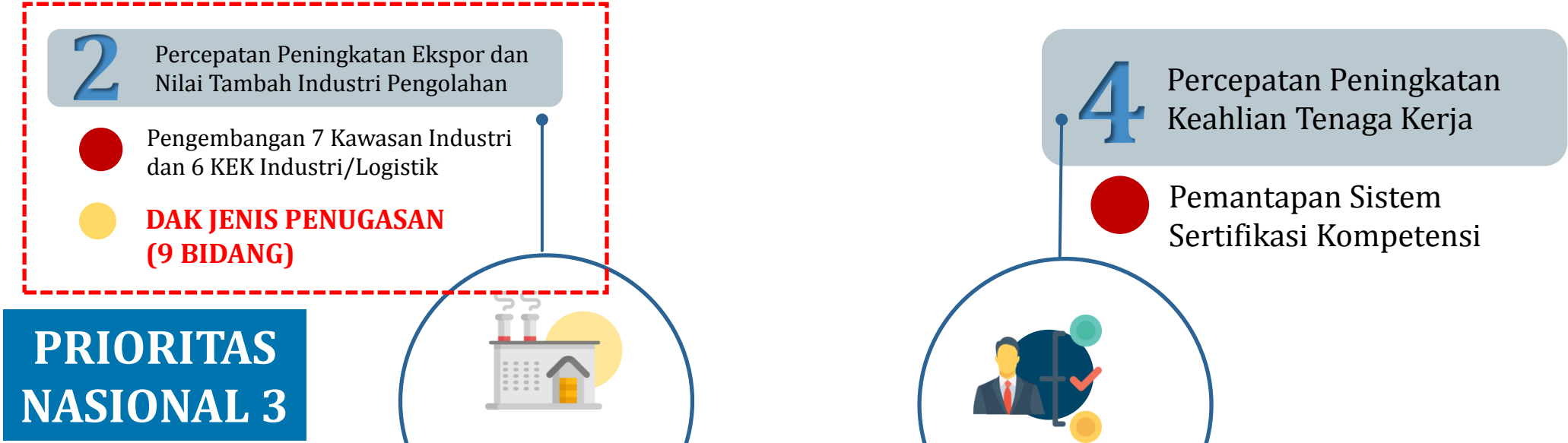
PP



KP

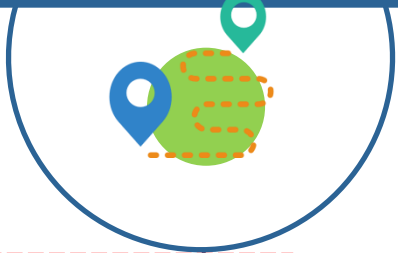


Didukung DAK Fisik



PRIORITAS NASIONAL 3

PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI MELALUI PERTANIAN, INDUSTRI, DAN JASA PRODUKTIF



2 Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan

- Penguatan Cadangan dan Stabilisasi Harga Pangan

4 Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan

- Rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
- **DAK LINGKUNGAN HIDUP KEHUTANAN (PENUGASAN) DAN IRIGASI (PENUGASAN)**

PRIORITAS NASIONAL 4



PEMANTAPAN KETAHANAN ENERGI, PANGAN, DAN SUMBER DAYA AIR



1 Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi

- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
- **DAK ENERGI SKALA KECIL (REGULER)**

3 Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air

- Pemeliharaan dan Pemulihan Sumber Air dan Ekosistem
- **DAK LINGKUNGAN HIDUP KEHUTANAN (PENUGASAN)**



PN



PP



KP



Didukung DAK Fisik



TERIMA KASIH



ASIAN GAMES | 2018
Jakarta Palembang



ANNUAL MEETINGS
2018 | Indonesia
INTERNATIONAL MONETARY FUND
WORLD BANK GROUP